

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian pembangunan mengandung makna peningkatan, pertumbuhan dan perubahan (Christenson, 1980: 7). Sebagai upaya peningkatan (improvement), pembangunan lebih cenderung difokuskan pada transformasi sosial dan psikologis pada masyarakat seperti pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, partisipasi dalam pembuatan keputusan politis, dan sebagainya. Pembangunan sebagai pertumbuhan (growth) terfokus pada kemakmuran ekonomi, di mana indikator utamanya adalah GNP (Gross National Product). Sedang sebagai perubahan (change), pembangunan dilihat sebagai perubahan sosial yang terencana dan terarah.

Pembangunan yang dilaksanakan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain adalah derasnya arus informasi, perubahan teknologi, nilai budaya, maupun peran keluarga. Perubahan yang pada hakekatnya diarahkan pada suatu tujuan tertentu, pada kenyataannya menimbulkan juga dampak yang tidak

diharapkan. Berbagai masalah sosial muncul di kalangan masyarakat pada umumnya. Beberapa kondisi yang ditemukan pada beberapa negara modern adalah terjadinya alienation, disorganisasi masyarakat, disintegrasi sosial, disorganisasi keluarga, serta asosial. Pada negara berkembang, pertumbuhan kota yang terjadi pesat diiringi pula dengan terjadinya penyusutan sumber daya alam, bertambahnya pengangguran, urbanisasi, tumbuhnya daerah-daerah kumuh, dan sebagainya. Berbagai perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh pula terhadap kehidupan dan perilaku generasi muda.

Dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang secara tegas telah digariskan apa yang harus dicapai oleh Pembangunan Nasional, yaitu : "Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia". Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, menuntut keseimbangan multidimensional pembangunan nasional. Moeljarto (1986 : 116) menyatakan bahwa pembentukan manusia Indonesia seutuhnya pada dasarnya adalah pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya ini perlu dilakukan secara simultan pada tiga lingkungan hidup, yaitu lingkungan hidup pertama (keluarga), lingkungan hidup kedua (masyarakat), dan lingkungan hidup ketiga (dunia pendidikan).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian harus disadari pula bahwa pembangunan tidak merupakan suatu proses yang membujur lurus, melainkan suatu jaringan perubahan yang berhubungan erat satu dengan lainnya. Karena pengalaman pahit, pendekatan terhadap pembangunan dengan pola "top-down" telah kehilangan kredibilitasnya. Sebagai reaksi, maka pendekatan "bottom-up" yang menekankan pada partisipasi, dianggap sebagai pendekatan yang lebih memberikan harapan untuk keberhasilan. Meskipun demikian partisipasi tanpa belajar dapat merupakan suatu latihan yang tidak berguna (Soedjatmoko, 1986 : 7). Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang berpartisipasi boleh jadi justru merasa kecewa dan frustrasi manakala tidak memperoleh sukses. Karenanya belajar merupakan pondasi bagi partisipasi.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan 34 berisi tentang kesejahteraan sosial. Pasal-pasal ini terbatas berbicara tentang perekonomian sebagai usaha bersama yang disusun atas asas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting serta kekayaan alam oleh negara, serta pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang sebagai mana dikemukakan

pada bagian sebelumnya, maka kesejahteraan sosial mengandung makna yang lebih jauh dan luas dari pada ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 1 dikemukakan pengertian Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

"Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila".

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah melaksanakan program-program kegiatan yang tanggung jawab dan pembinaannya ditangani oleh Departemen Sosial. Beberapa kegiatan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Meskipun demikian, keberhasilan upaya tersebut sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan dalam pembangunannya. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial generasi muda, pemerintah telah membentuk wadah sosial pemuda Karang Taruna yang menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Meskipun demikian seperti apa yang dikemukakan Soedjatmoko, pembangunan harus dilihat tidak sebagai sesuatu yang kita perbuat lewat kegiatan dan

keterampilan yang kita peroleh, melainkan sebagai sesuatu yang kita belajar. Dengan demikian maka yang terpenting dari adanya Karang Taruna adalah bukan sejauh mana Karang Taruna berbuat selaku partner pemerintah dalam kesejahteraan sosial, tetapi sejauh mana generasi muda melalui mekanisme tersebut mampu belajar.

B. MASALAH DAN PEMBatasan MASALAH

Generasi muda merupakan sumber tenaga manusia muda (young human resources) atau juga sebagai tenaga kerja potensial (potential man-power) yang akan menentukan kemajuan bangsa dan negara. Potensi generasi muda untuk dilibatkan secara aktif dalam pembangunan nasional meliputi :

- a. Idealisme dan daya kritis;
- b. Dinamika dan kreativitas;
- c. Keberanian mengambil resiko;
- d. Optimisme dan kegairahan semangat;
- e. Sikap kemandirian dan disiplin murni;
- f. Terdidik;
- g. Fisik kuat dan jumlah yang banyak; dan lain-lain.

Sebagai tenaga potensial yang diharapkan mampu melanjutkan pembangunan, generasi muda memerlukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988 dinyatakan bahwa :

"Pembinaan dan pembangunan pemuda diarahkan untuk membentuk kader bangsa yang tangguh, dan diupayakan pula sebagai usaha mengatasi berbagai masalah lapangan kerja dan pendidikan. Pembinaan pemuda perlu dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap tantangan pembangunan masa depan sehingga akan meningkatkan kegiatan kepemudaan yang berdaya guna dan berhasil guna".

Uraian tersebut di atas menyiratkan bahwa generasi muda diharapkan mampu melanjutkan perjuangan bangsa. Sebagai sumber daya manusia yang sangat besar dan strategis, di tangan generasi muda akan ditentukan keberhasilan pengalihan tongkat kepemimpinan dan perjuangan dalam membangun masa depan bangsa. Meskipun demikian jumlah yang besar dari generasi muda ini dapat menjadi bumerang bilamana tidak mendapat pembinaan dan pengembangan yang terencana dan terarah.

Pemerintah dalam upayanya membina dan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap tantangan pembangunan masa depan, menegaskan perlunya pematapan fungsi dan peranan wadah kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, Pramuka, dan OSIS (TAP MPR RI Nomor II/MPR/1988). Dari keempat wadah kepemudaan yang tercantum dalam GBHN tahun 1988 tersebut, organisasi pemuda Karang Taruna menganut keanggotaan dengan sistem stelsel pasif. Dengan sistem ini secara otomatis seluruh generasi muda yang berusia antara 7-40 tahun merupakan anggota Karang Taruna. Oleh karenanya Karang Taruna yang program dan

kegiatannya didasarkan pada prinsip swadaya, dapat dipandang sebagai mekanisme yang sangat potensial dalam membina dan mengembangkan generasi muda.

Menurut pengertiannya Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi mudanya. Karang Taruna melibatkan seluruh generasi muda di desa/kelurahan dan secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan. Dalam hal ini sebagai manusia pembangunan, generasi muda diharapkan mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya melalui usaha-usaha pencegahan, pelayanan dan pengembangan sosial.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 ayat 1 dan 3, dikemukakan bahwa satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah, dan bahwa satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Sedangkan pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan yang tidak

harus berjenjang dan berkesinambungan. Dengan demikian sebagai salah satu wadah pendidikan luar sekolah, Karang Taruna harus mampu menciptakan pemuda yang mampu belajar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Suzanne Kindervatter yang menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan harus berperan sebagai empowering process. Pendidikan luar sekolah sebagai empowering process menempatkan kepentingan pada bagaimana proses dan hubungan pendidikan dalam mempengaruhi pelajar. Dalam hal ini programnya dirancang untuk memungkinkan orang mampu secara kritis menganalisis situasi kehidupan mereka sendiri dan membangun keterampilan yang disyaratkan untuk meningkatkan kehidupan mereka (Kindervatter, 1979 : 13).

Karang Taruna yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial dituntut untuk dapat membentuk pemuda yang mampu secara terus menerus meningkatkan kemampuan diri maupun lingkungannya, khususnya di bidang kesejahteraan sosial tersebut. Penelitian ini bermaksud melihat peranan Karang Taruna dalam membentuk pemuda yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, serta dalam meningkatkan kesejahteraan sosial generasi muda khususnya.

Di Kotamadya Bandung khususnya, secara resmi Karang Taruna dibentuk tahun 1985 menggantikan Taruna Karya.

Taruna Karya juga merupakan wadah pembinaan pemuda, namun kegiatannya terbatas pada kegiatan olah raga dan rekreasi untuk menyalurkan potensi dan minat pemuda pada kedua bidang tersebut. Setelah lima tahun sejak berdirinya di Kotamadya Bandung ini, masih dapat dihitung jumlah Karang Taruna yang dianggap berhasil melaksanakan program yang sesuai dengan fungsinya sebagai partner pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di kalangan generasi muda.

Ditinjau dari kriteria kepengurusan, kegiatan dan program kerja, administrasi, serta keanggotaan, terdapat empat klasifikasi Karang Taruna, yaitu :

1. Karang Taruna Tumbuh
2. Karang Taruna Berkembang
3. Karang Taruna Maju
4. Karang Taruna Percontohan

Menurut penilaian terakhir (tahun 1990) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kotamadya Bandung, pada saat ini baru terdapat 11 (sebelas) organisasi Karang Taruna yang termasuk klasifikasi percontohan, dari sejumlah 103 Karang Taruna yang ada di wilayah Kotamadya Bandung.

Mengingat bahwa keberadaan Karang Taruna telah berlangsung selama lima tahun, kecilnya jumlah Karang Taruna yang berhasil mencapai klasifikasi percontohan merupakan gejala yang menarik untuk diteliti. Kepala Dinas Sosial

Kotamadya Bandung (1989 : 3) mengemukakan bahwa secara global permasalahan yang menyangkut organisasi Karang Taruna antara lain :

1. Belum mantapnya keberadaan Karang Taruna;
2. Hampir setiap Karang Taruna belum mengikuti catur tertib, yaitu : (a) Tertib Organisasi; (b) Tertib Administrasi; (c) Tertib Personal, dan (d) Tertib Operasional;
3. Hampir setiap Karang Taruna belum memiliki program kerja yang sistematis dan terorganisir;
4. Kegiatan-kegiatannya masih bersifat musiman dan terutama terbatas pada olah raga dan kesenian (rekreatif) serta terbatas pada keikutsertaan memperingati hari nasional;
5. Frekuensi pembinaan dan bimbingan teknis masih kecil;
6. Keikutsertaan pihak pengusaha swasta terhadap pembinaan masih belum tampak.

Dalam upaya memahami permasalahan yang sebenarnya dihadapi Karang Taruna sehingga belum mampu berfungsi secara optimal, harus diperhatikan pengaruh lingkungan terhadap organisasi tersebut. Cyert dan Mac Crinon (1975 : 593) menyatakan :

"No organisation can be understood without examining its relationship to its environment. The organisation comes to offer the certain problem posed by the environment. The organisation must provide a solution subject to a series of constraints which

are economic, technological, political, legal, and cultural in nature".

Sedang Krech dkk. (1962 : 474) mengemukakan bahwa :

"...the behavior of a group in an organization is considerably influenced by the organizational context, and can not be studied as though the group were an independent, autonomous unit". Dengan memperhatikan kedua pernyataan tersebut, maka walaupun secara organisasi Karang Taruna berdiri sendiri, untuk memahami permasalahan yang dihadapinya harus diperhatikan konteks organisasional serta lingkungan yang mempengaruhinya.

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi meliputi nilai budaya setempat, potensi sumber daya yang ada, serta permasalahan sosialnya. Sedangkan dalam konteks organisasionalnya, Karang Taruna memiliki hubungan dengan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT), serta dengan Pembina Organisasi dan Pembina Fungsional. FKKT berada di tingkat kecamatan dan berfungsi sebagai alat pertukaran informasi dan penengah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masing-masing Karang Taruna Desa/ Kelurahan. Pembina Organisasi terdiri dari Kepala Desa/Lurah dan Camat. Sedang pembina fungsional adalah Dinas Sosial Kotamadya beserta Petugas Sosial Kecamatan (PSK). Dengan demikian ditinjau dari konteks organisasionalnya,

permasalahan Karang Taruna tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi FKKT, Pembina Organisasi maupun Pembina Fungsional.

Krech dkk. (1962 : 471) juga mengemukakan bahwa :

"The effectiveness of a group depends partly upon its structural characteristics - its size, member composition. Effectiveness depends in part upon intermediate variables - such characteristics of group interaction as the style of leadership, the interdependence of member motivation, and in amount and quality of friendship relation".

Hal ini berarti bahwa selain faktor eksternal yang meliputi lingkungan dan konteks organisasional, efektivitas organisasi juga dipengaruhi oleh faktor internal pada organisasi tersebut.

Secara umum permasalahan yang dihadapi organisasi Karang Taruna sebagai mekanisme pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial adalah belum mampu melaksanakan fungsinya secara optimal. Krech (1962 : 310) menyatakan bahwa :

"The contribution that a position makes to be objective and purpose of the community represents the function of the position What a typical occupant of a given position is expected to do constitutes the role associated with the position".

Sehubungan dengan pentingnya peran dalam pelaksanaan fungsi suatu posisi sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi, maka penelitian ini diarahkan pada : Bagaimana peran pengurus, pembina dan FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna), dalam mengoptimalkan fungsi Karang Taruna.

Secara lebih rinci permasalahan itu dijabarkan ke dalam fokus sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran Karang Taruna saat ini meliputi bentuk dan jenis kegiatan, prioritas masyarakat sasaran, sumber dana yang digunakan dan keberhasilannya ?
2. Sampai sejauh mana peran pengurus, FKKT dan pembina dalam meningkatkan fungsi Karang Taruna ?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Karang Taruna ?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi FKKT ?
5. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Pembina ?

Penelitian ini dibatasi pada Karang Taruna yang berada di Kecamatan Cicadas Kotamadya Bandung, meliputi tiga desa/kelurahan yaitu Kelurahan Antapani, Desa Mandalajati, serta Desa Karang Pamulang. Pemilihan wilayah Kecamatan Cicadas sebagai daerah objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Kecamatan Cicadas yang menjadi objek penelitian ini semula termasuk daerah Kabupaten Bandung, dan baru sejak April 1989 menjadi wilayah Kotamadya Bandung. Oleh

karena itu Kecamatan Cicadas ini merupakan daerah transisi di mana kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh pola masyarakat Gemeinschaft yang akrab, maupun oleh kehidupan Gessellschaft di mana hubungan antara orang telah banyak didasarkan pada hubungan rasional formal yang berwujud organisasi.

2. Daerah Cicadas ini dikenal sebagai "nagara beling" di mana masyarakatnya dikenal sebagai "tukang golok", "tukang tarok", "tukang babadog". Predikat ini secara tidak langsung mempengaruhi pola perilaku kehidupan masyarakatnya, termasuk juga pola perilaku dan kehidupan generasi mudanya.
3. Sebagai daerah yang membatasi Kotamadya Bandung dengan daerah-daerah bagian timur, Kecamatan Cicadas berdekatan dengan kawasan terminal antar kota maupun dalam kota. Keberadaan terminal Cicahaem ini sedikit banyak memberikan dampak pada kehidupan generasi muda di lingkungan tersebut. Di samping, sebagai daerah yang memberikan kesempatan untuk berbagai usaha ekonomi, daerah terminal merupakan kantong kriminalitas dan kerawanan sosial. Permasalahan sosial dikalangan generasi muda yang muncul sejalan dengan keberadaan terminal ini antara lain adalah : munculnya tukang pungutan liar, pemabuk dan penjual minuman keras tanpa

ijin, penggunaan senjata tajam dalam kejahatan, dan lain-lain.

Beberapa hal seperti tersebut di atas, menyebabkan Kecamatan Cicadas merupakan daerah yang rawan masalah sosial khususnya di kalangan generasi muda. Hal ini menjadikan Kecamatan Cicadas sebagai daerah yang penuh tantangan untuk mengatasi permasalahan sosial generasi muda. Dalam penelitian ini para pemegang peran dijadikan sumber data utama, sedang para anggota aktif maupun pasif serta para tokoh masyarakat dijadikan sebagai sumber data pendukung.

C. PENGERTIAN JUDUL PENELITIAN

Judul penelitian ini adalah : Mekanisme Karang Taruna dalam Mengembangkan Kesejahteraan Sosial Generasi Muda. Untuk memberikan kejelasan terhadap arti yang terkandung dalam judul ini, peneliti mencoba menjabarkan pengertian tersebut.

1. Karang Taruna

Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial masyarakat yang merupakan salah satu mekanisme pembinaan dan pengembangan generasi muda. Karang Taruna tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama di wilayah desa/kelurahan. Organisasi sosial ini secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. Keberadaan Karang

Taruna terdaftar pada Dinas Sosial setempat.

Sesuai dengan fungsinya Karang Taruna mempunyai tugas pokok yaitu bersama-sama pemerintah menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial, serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Sebagai suatu organisasi sosial masyarakat, Karang Taruna berbeda dengan organisasi masyarakat dalam bentuk sebagaimana yang dikenal di Indonesia. Sedangkan bila mana kita mengikuti definisi dari Arthur Dunham tentang Community Organization, maka Karang Taruna adalah juga salah satu organisasi masyarakat. Dunham (1970 : 4) mengemukakan sebagai berikut :

"Community Organization ... means a conscious process of social interaction and a method of social work concerned with any or all of the following objectives : (a) the meeting of board needs and bringing about and maintaining adjustment between needs and resources in a community or another area; (b) helping people to deal more effectively with their problems and objectives, by helping them develop, strengthen, and maintain qualities of participation, self-direction, and cooperative relationships and in the distribution of decision making power".

Menurut definisi yang dikemukakan Dunham ini, organisasi masyarakat memiliki tiga tipe tujuan yang dapat dipisahkan sebagai task goals, process goals, dan relationship goals. Task goals berkenaan dengan tugas-tugas kongkrit, misalnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik atau untuk memecahkan masalah tertentu. Sedang relationship goals terutama terfokus pada

upaya mengubah hubungan kelompok dan masyarakat serta penyebaran kekuatan dalam pembuatan keputusan. Process goals terutama berurusan dengan pemecahan masalah dan selalu tumbuh sebagai suatu respons terhadap adanya masalah atau kebutuhan. Meskipun demikian fungsi terpenting yang terutama dan yang paling ditekankan selama ini adalah upaya untuk social change.

Dengan memperhatikan definisi tentang organisasi masyarakat seperti tersebut di atas, penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan fungsi Karang Taruna sebagai salah satu organisasi sosial masyarakat, dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi generasi muda maupun dalam mencoba melakukan perubahan sosial.

2. Mekanisme dalam Mengembangkan Kesejahteraan Sosial

Sejalan dengan tuntutan dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda, telah dibentuk Karang Taruna sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda. Dalam melaksanakan perannya Karang Taruna harus selalu konsisten dengan tugas pokoknya yaitu untuk menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai:

"organized activities intended to promote social well being by improving or maintaining the economic conditions, health, or interpersonal competence of all or part of a population" (Dunham, 1970 : 14).

Sedang secara sederhana pengertian tentang kesejahteraan sosial sebagai mana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1974, pada dasarnya menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu kehidupan sosial yang selaras dan seimbang antara segi lahir dan bathin, material dan spiritual, dalam suasana yang aman, nyaman dan tenteram. Dengan kondisi ini setiap warga negara diharapkan mampu mengadakan usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri maupun masyarakatnya. Dalam hal ini penelitian ditujukan pada pelaksanaan fungsi Karang Taruna dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial generasi muda.

Secara lebih spesifik berkenaan dengan kesejahteraan sosial generasi muda, masalah yang harus ditangani adalah (Sudradjat, 1989 :8) :

- a. Usia 7 - 12 tahun, meliputi anak asuh, anak yatim, anak cacat, serta street children.
- b. Usia 13 -19 tahun, meliputi masalah keterlantaran, underemployment, perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkotika, cacat, dan ketiadaan keterampilan.
- c. Usia 20 - 25 tahun, meliputi masalah lapangan kerja, pergaulan bebas, vandalisme, cacat, dan penyalahgunaan narkotika.
- d. Usia 25 - 40 tahun meliputi masalah lapangan kerja, dan masalah-masalah dalam keluarga.

Dengan demikian, mekanisme Karang Taruna dalam mengembangkan kesejahteraan sosial generasi muda, harus ditujukan pada upaya mengatasi permasalahan sosial generasi muda secara umum (7 - 40 tahun).

Indikator keberhasilan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan kesejahteraan sosial adalah :

- a. Prioritas program pada upaya pemecahan masalah generasi muda di lingkungannya ;
- b. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab sosial generasi muda ;
- c. Meningkatnya kesadaran dan pengamalan P-4 di kalangan generasi muda ;
- d. Terlaksananya usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat rekreasi, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya.
- e. Tercegahnya kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba ;
- f. Terciptanya lapangan kerja bagi penyandang masalah pengangguran ;
- g. Meningkatnya peran serta generasi muda dalam program pembangunan;
- h. Meningkatnya citra Karang Taruna di mata generasi muda maupun masyarakat pada umumnya.

Yang dimaksud dengan mekanisme dalam penelitian ini adalah proses yang akan meningkatkan suatu kondisi awal ke

kondisi yang lebih tinggi. Dalam hubungannya dengan Karang Taruna dan tugas pokoknya, organisasi pemuda ini dituntut mampu mengembangkan kondisi kesejahteraan sosial generasi muda. Mengembangkan mengandung dimensi vertikal maupun horisontal. Dengan demikian di dalam Karang Taruna harus terjadi proses yang meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial generasi muda, serta memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang diharapkan.

Penelitian ini memandang Karang Taruna sebagai alat perubahan sosial yang didalamnya terjadi proses pembentukan pemuda yang mampu mengadakan perubahan-perubahan maupun pembaharuan menuju kondisi kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Proses yang terjadi di dalam Karang Taruna ini tidak terlepas dari nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat serta potensi dan permasalahan lingkungan.

3. Generasi Muda

Karang Taruna adalah alat pembinaan dan pengembangan potensi pemuda yang menganut sistem keanggotaan stelsel pasif, di mana seluruh pemuda di desa/kelurahan yang ber-usia 7 - 40 tahun secara otomatis merupakan anggota Karang Taruna. Maka yang dimaksud generasi muda dalam penelitian ini adalah pemuda usia 7 - 40 tahun yang berperan secara aktif dalam

kegiatan Karang Taruna, baik sebagai subjek maupun objek layanan kesejahteraan sosial. Dilihat dari kedudukannya dalam organisasi, pemuda Karang Taruna dapat dikelompokkan ke dalam : (a) Pengurus, (b) Anggota Aktif, dan (c) Anggota Pasif. Generasi muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota aktif, dengan anggota pasif sebagai objek penelitian pendukung.

4. Peran

Leslie L. Roos Jr. dan Frederick A. Starke mengemukakan bahwa peran didefinisikan sedikitnya dalam tiga hal yaitu (Nystrom, 1981, 290) :

- a. As normative culture patterns (Linton, 1936; Zuaniecki, 1940).
- b. As expectations helds by those people who interact with the individuals occupying positions (Cross et al, 1958, Persons and Shils, 1951: Sargent, 1951).
- c. As the actual behavior of the occupants of definitions (David, 1949: Sarbin, 1954; Slater, 1965).

Dengan demikian peran mengandung suatu aturan, harapan, dan perilaku nyata mengenai pemegang peran tersebut. Walaupun ketiga definisi tersebut telah lama digunakan, Deutsch dan Krauss (1965) menyatakan :

"In general, the dominant convection uses the term role to denote the behavior enactment of the part of the status which prescribes how the status occupant should act toward the persons with whom his status rights and obligation put him in contact (Nystrom, Ibid, opcit).

Secara singkat ini menuntut bahwa seseorang yang memegang peran harus berlaku/ bertindak sesuai dengan hak dan

kewajiban yang diemban peran tersebut. Dalam International Encyclopedia of The Social Sciences Volume XIII (1968 : 546), dikemukakan bahwa peran (role) dapat dilihat dari aspek sosiologis maupun psikologis. Konsep peran ini masuk ke dalam psikologi melalui upaya-upaya lintas disiplin dari sejumlah ahli psikologi klinis dan sosial. Konsep peran berdasar pada metafora dramaturgi yang secara sistematis pertama kali dieksploitasi oleh George H. Mead.

Dari aspek psikologis, peran digunakan untuk menampilkan perilaku yang diharapkan dari pemegang status atau posisi tertentu. Dalam hal ini dua ciri yang ditekankan adalah : (a) expectations, dan (b) enactments. Dengan demikian aspek psikologis menekankan pada pengharapan seorang pemegang peran dalam hubungannya dengan perilaku yang sesuai dengan posisinya, serta pada perbuatan seseorang yang ditugaskan atau dipilih untuk memasuki suatu peran tertentu.

Melalui aspek sosiologis, Ralph H. Turner (1968 : 553) mengemukakan bahwa peran dapat dipandang sebagai interactive framework, dari segi aktor pemegang peran tersebut, maupun dalam setting organisasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis sosial dengan penekanan pada aspek sosiologis, yang difokuskan pada kerangka kerja interaktif antara pemegang peran,

serta pada setting organisasional Karang Taruna.

D. FOKUS PENELITIAN

Penelitian mengenai Karang Taruna ini difokuskan pada peran (role), khususnya peran Pengurus, Tim Pelaksana FKKT dan Pembina Karang Taruna. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa efektivitas organisasi terutama bergantung pada berfungsinya peran seseorang atau sesuatu tugas. Seperti yang dikemukakan oleh Krech (1962 : 311):

"What a typical occupant of a given position is expected to do constitutes the roles associated with the position. A role can be seen as encompassing, among other things, the duties or obligations of the position".

Mitchell dan Larson (1987 : 263) juga mengemukakan bahwa peran membantu kita memahami banyak masalah dalam organisasi seperti konflik peran, ambiguitas peran, dan peran yang berlebihan (overload). Peran pengurus dijadikan fokus utama penelitian mengingat pengurus adalah motor penggerak bagi suatu organisasi. Dalam hal ini penelitian bermaksud memperoleh gambaran tentang bagaimana peran pengurus dalam belajar mencari alternatif pemecahan masalah, serta dalam memotivasi anggotanya untuk belajar dalam makna yang luas. Secara sederhana penulis melihat organisasi ini sebagai kelompok belajar yang seharusnya mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungannya, untuk mengatasi permasalahan sosial.

Dengan memandang Karang Taruna sebagai suatu kelompok belajar, maka Forum Komunikasi Karang Taruna dapat dipandang pula sebagai peer-group yang anggotanya berasal dari masing-masing Karang Taruna yang ada di desa/kelurahan. Dalam hal ini peneliti bermaksud memperoleh gambaran apakah peer group ini mampu berfungsi sebagai mekanisme untuk berbagi pengalaman maupun permasalahan yang dihadapi Karang Taruna dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan Karang Taruna.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih bersifat paternalistis, peran pembina dapat dikatakan masih sangat dibutuhkan. Sedang dalam hubungannya dengan kelompok belajar tadi, penulis melihat pembina ini sebagai kon-
sultan manakala kelompok belajar mengalami kesulitan dalam proses belajarnya.

Secara umum penelitian yang terfokus pada peran Pengurus, Tim Pelaksana FKKT, dan Pembina ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan fungsi peran tersebut saat ini, permasalahan apa yang melatar belakangkannya dan yang mungkin akan timbul dari padanya, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

E. ANGGAPAN DASAR

Beberapa anggapan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dilihat dari segi kuantitatif maupun kualitatif, pemuda memiliki potensi yang besar. Pada akhir Pelita kedua diperkirakan jumlah penduduk di bawah usia 29 tahun berjumlah 88,9 juta atau 62,8% dari jumlah penduduk (Tilaar, 1987 : 31). Dari sisi kualitatif berbeda dengan masa kanak-kanak yang di dalam konsep wawasan kehidupan masih sangat bersifat konsumtif, masa pemuda telah mempunyai kemampuan produktif, baik secara fisik, mental, maupun intelektual. Jika kemampuan ini diarahkan, dimanfaatkan secara sadar dan terintegrasi dalam program pembangunan, maka potensi pemuda yang secara kuantitatif sangat besar itu akan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
2. Karang Taruna belum berfungsi secara optimal. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Cabang Kotamadya Bandung seperti tersebut pada halaman 10 tentang permasalahan yang dihadapi Karang Taruna.
3. Karang Taruna adalah alat yang potensial bagi pengembangan generasi muda. Dengan letak yang berada di desa/kelurahan dan langsung di tengah-tengah masyarakat, Karang Taruna memiliki anggota yang dari sisi jumlah terlihat sangat potensial. Potensi yang besar ini perlu dimanfaatkan secara maksimal mengingat hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Nystrom dan Starbuck (1987 : xiii) mengemukakan sebagai berikut :

"All designers hope to improve organizations - to make organizations more efficient, more humane, more fun, more useful to society or whatever - and the opportunities for improvement are tremendous. Since organizations constitute the predominant mode of social organizations in industrialized, urbanized societies, even very small improvements may effect millions or tens of millions of people. And the evidence seems overwhelming that very large improvements could be made".

Dengan potensi yang dimilikinya tersebut, permasalahan yang dialami Karang Taruna saat ini tidaklah patut diabaikan. Sebaliknya upaya peningkatan yang dilakukan, seberapapun kecilnya akan dapat meningkatkan pula kualitas program Karang Taruna. Kualitas program akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial generasi muda di lingkungannya.

4. Karang Taruna adalah suatu Open-System. Sebagai suatu open-system Karang Taruna dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Pendekatan open-system ini memasukkan lingkungan ke dalam analisis dalam upaya menghubungkannya dengan masalah sistem sebagai keseluruhan dan menjelaskan perilaku organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan lingkungan (Silverman, 1974 : 32). Dengan menggunakan pendekatan ini, Karang Taruna yang secara organisasi berdiri sendiri, dipandang tetap memiliki hubungan dengan sub sistem lainnya yaitu Forum Komunikasi

Karang Taruna dan Pembina.

5. Organisasi Karang Taruna adalah wadah belajar. Bo Hedberg mengemukakan : "Learning takes place when organizations interact with their understanding of reality by observing the results of their acts (Nystrom, 1981 : 3). Karena Karang Taruna berinteraksi dengan lingkungannya maka diharapkan organisasi ini dapat meningkatkan pemahamannya terhadap realitas dengan mengobservasi hasil kerja mereka. Hal ini berarti bahwa Karang Taruna adalah wadah yang di dalamnya harus terjadi proses belajar. Suatu organisasi dapat berkembang manakala ia belajar dari lingkungan, dari informasi yang ia terima, serta dari realitas (feedback), dan lain-lain. Sebagai suatu wadah tempat belajar suatu saat ia akan mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini maka Forum Komunikasi Karang Taruna dipandang sebagai peer-group, sedang Pembina dipandang sebagai konsultan.
6. Peran adalah interdependen. Krech (1962 : 311) mengemukakan : "The role associated with any given position in a group as necessarily defined in relation to the roles of other related positions". Dengan memandang peran-peran dalam organisasi saling bergantung/berhubungan, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa peran kunci yang terutama mempengaruhi efektivitas proses belajar anggota organisasi.

F. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang peran Karang Taruna sebagai mekanisme pengembangan tingkat kesejahteraan sosial generasi muda di lingkungannya. Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang kualitas dan kuantitas program Karang Taruna di Kecamatan Cicadas.
2. Untuk mengetahui dampak program Karang Taruna tersebut terhadap individu anggota kelompok dan masyarakat sekitarnya.
3. Untuk mendiagnosa kelemahan yang ada dalam organisasi Karang Taruna yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi organisasi ini sebagai mekanisme pengembangan dan pembinaan pemuda.
4. Untuk memperoleh gambaran mendalam tentang peran pengurus, pembina, dan tim pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT), dalam mengoptimalkan fungsi Karang Taruna.